

PERANAN MAKRO-EKONOMI PADA SITUASI STATUS QUO PASCA KERUNTUHAN ANTAR MASA KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN

Wira Ganet Aribowo¹

¹ Program Studi Manajemen, Universitas Merdeka Madiun, Jln. Serayu Timur No. 79, Madiun, 63133
E-mail: wiraganet@unmer-madiun.ac.id

Abstract— *The economic crisis is one of the triggers for economic crises in various countries from time to time. It's not just the economic crisis, apart from that, the more important thing is the collapse of the structure of society, the direction of the economy and politics in the future, in the status quo situation after the collapse between leadership periods in Indonesia, where government product regulations, including external institutions, cause uncontrolled public reactions to the transition situation. This article discusses the situation in Indonesia from era to era, from a macro-economic, political and institutional perspective. So economics and politics are a forum for leaders to decide on strategic policies in leading the government during the transition period.*

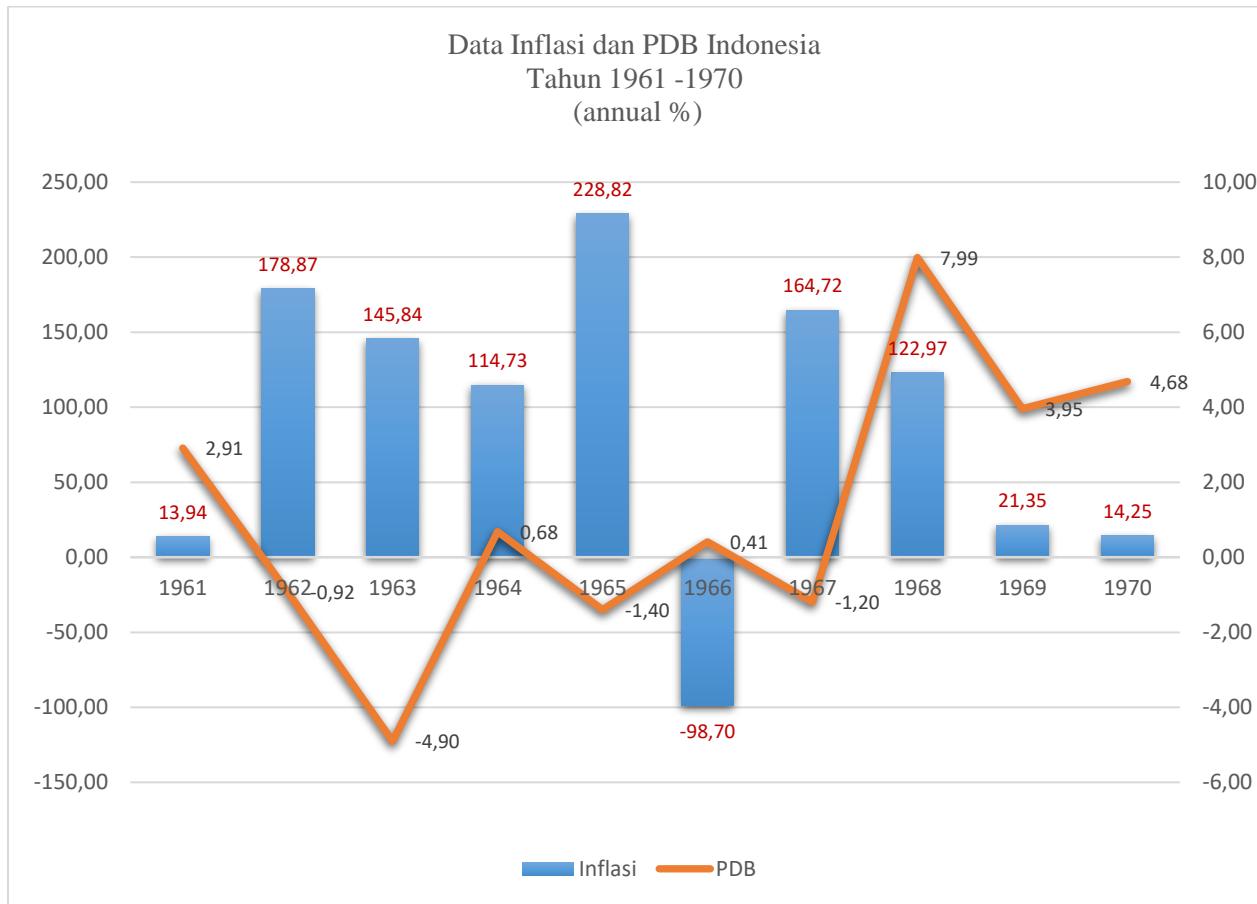
Keywords—: Makro-ekonomi; Politik; Economics.

I. PENDAHULUAN

Pada era pemerintahan Soekarno mendominasi pertarungan ideologi antara dua blok *super-power* menyebabkan adanya polarisasi ekonomi dan politik, meskipun ideologi yang dianut adalah pancasila akan tetapi arah politik pada kekuatan sosialis-komunis sehingga berpengaruh pada *framing* ekonomi. Kondisi politik dan keamanan negara pada awal kemerdekaan tahun 1950 belum stabil, masih bermunculan gerakan sparatis menjadikan terganggunya stabilitas ekonomi.

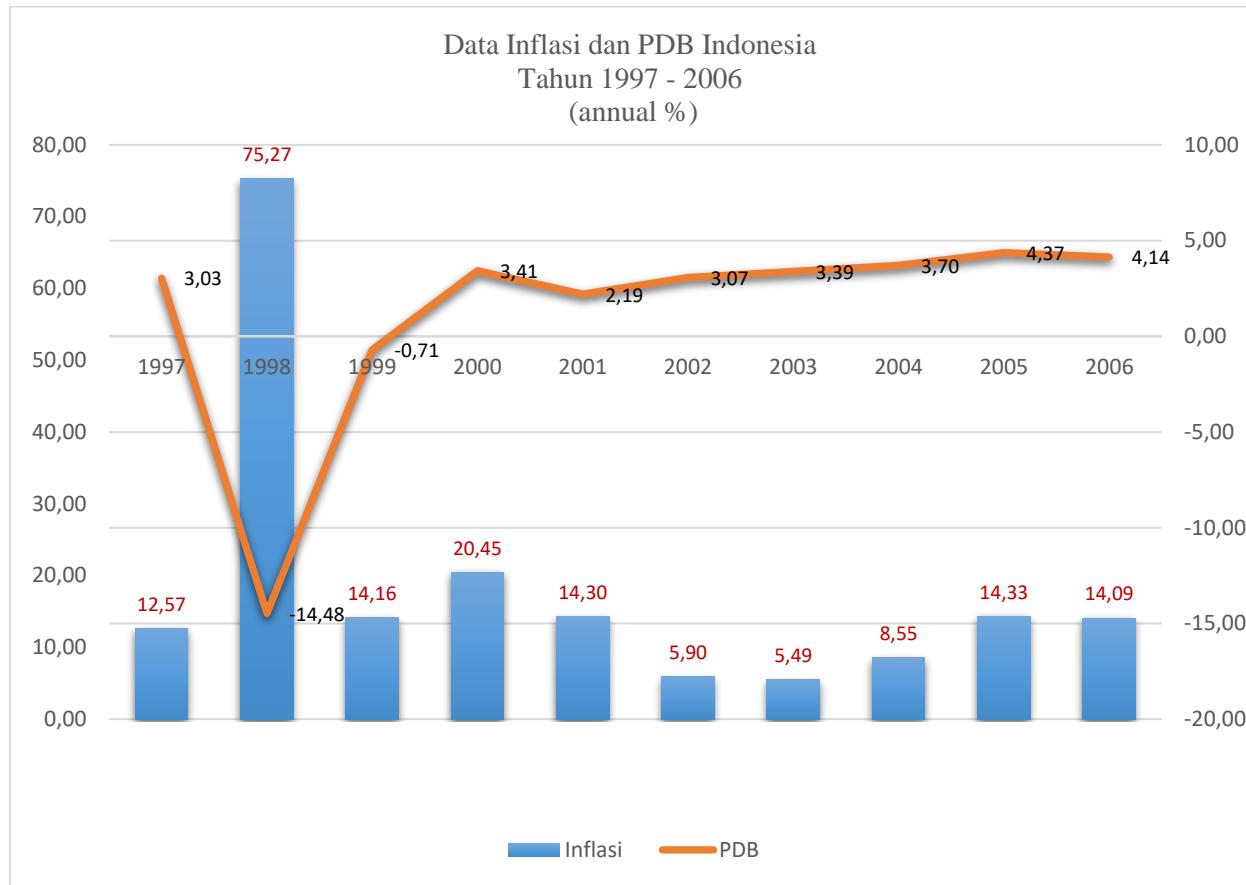
Upaya untuk memperbaiki stabilitas politik lebih utama daripada menanamkan fundamental ekonomi, serta pengabaian bantuan luar negeri dari institusi moneter internasional yang dipelopori oleh IMF, dengan demikian menyebabkan pembangunan ekonomi tidak mengalami perkembangan selama kurun waktu 1945-1965. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa gap inflasi pada kurun waktu 1965-1966 mencapai 328 persen dan setelah pasca Soekarno, sehingga Indonesia mengalami volatilitas yang luar biasa serta kesulitan pendanaan, dan kebijakan perekonomian yang tanpa arah. Keadaan ekonomi yang tidak stabil mendorong aliansi-aliansi masyarakat dan pelajar untuk menggulingkan pemerintahan pasca kudeta militer, mendorong untuk bergantinya rezim yang menentukan arah politik sekaligus arah ekonomi Indonesia. Dalam kemajuan kebijakan ekonominya, rezim Orde Baru yang berkuasa mulai tahun 1965 memilih paradigma berbeda sebagai pelengkap pandangan pemikiran rezim sebelumnya, untuk menyelesaikan dan mengelola permasalahan perekonomian negara.

Membangun sentralisasi politik pada kekuatan pembangunan ekonomi sebagai determinan (faktor penentu) serta membuka kerjasama yang seluas-luasnya dengan negara lain, salah satunya negara pro-barat. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada bantuan luar negeri (*foreign aid*) sebagai *supplement* (pelengkap) dalam mendukung Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dalam menghadapi tingginya inflasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian, pemerintah menyusun rencana program stabilisasi ekonomi secara komprehensif yang diberi nama Paket Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi (Paket Oktober 1966).

**Gambar 1:** Inflasi dan PDB Indonesia Tahun 1961-1970

Sumber : WorldBank, 2023

Orde baru membangun paradigma ekonomi yang berbeda dari era sebelumnya, teori ekonomi Model Pertumbuhan Harrot-Domar, Teori Pertumbuhan Adam Smith, Teori Kuantitas Ricardo serta teori-teori lain, menjadikan dasar untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis pembangunan ekonomi. Negara mengadopsi praktik ekonomi yang sehat di bawah rezim Orde Baru. Militer, yang masih menjadi tokoh dominan dalam struktur politik, mendukung kebijakan yang lebih ilmiah dan obyektif dengan memberi ruang tersendiri untuk para teknokrat, yang diharapkan berada di luar jangkauan konflik politik dan sosial. Keberhasilan orde baru dalam struktur pembangunan utamanya ekonomi Indonesia, ketika pemerintah tersandera pada kepentingan regional maupun global yang tidak menguntungkan, berdampak pada pilihan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, sehingga mendorong elemen masyarakat melakukan tindakan tidak terstruktur, untuk melakukan tindakan pembelotan besar-besaran. Ketika suprastruktur runtuh, masalah politik dan sosial otomatis muncul. Selain itu, dalam kasus Indonesia, Orde Baru dipandang sebagai "komponen aliansi antara modal asing dan kekuatan politik-birokrasi dalam negeri yang didominasi oleh militer." Penafsiran dasarnya adalah bahwa dukungan sistem kapitalis mengakibatkan masuknya modal asing dan keluarnya surplus komoditas. Keuntungan dari surplus ini dinikmati oleh kelas penguasa yang didominasi oleh militer, sementara kesenjangan antar struktur kelas semakin meningkat. Faktanya, ada keyakinan bahwa meningkatnya kesenjangan, penindasan, dan isolasi kelas penguasa akan mengarah pada reaksi yang dipimpin oleh kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini, penting untuk melihat kebijakan ekonomi rezim Orde Baru.

**Gambar 2:** Inflasi dan PDB Indonesia Tahun 1997- 2006

Sumber : WorldBank, 2023

II. METODE PENELITIAN

Teori tentang status quo pasca keruntuhan antar masa kepemimpinan dapat ditinjau dalam berbagai prespektif, dalam hal ini lebih spesifik pada rumpun ilmu ekonomi, yang dapat dikaji dan dianalisis oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mengalisis studi kasus. Metode kualitatif merupakan langkah-langkah penelitian untuk mendapatkan data deskriptif berupa tulisan dan gambar. Seperti halnya pendapat Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata atau juga gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, namun berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Bogdan dan Tailor dalam kutipan Moeleong, mendefinisikan metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan khususnya dalam bentuk tindakan kebijakan (Moeleong, Lexy J. 2002:112). Tujuan dari penelitian deskriptif analitik ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Merupakan strategi penelitian yang dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Masalah dibatasi oleh waktu dan juga aktivitas, penulis mengumpulkan informasi dengan lengkap serta menggunakan pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995).

Dari hal tersebut membangun batasan kerangka berpikir bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran objek observasi berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut dipahami secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar belakang atau konteks masing-masing, dengan maksud untuk mernahami berbagai keterkaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Adapun variable yang akan menjadi bahasan dari Situasi Status Quo Pasca Keruntuhan Antar Masa Kepemimpinan Indonesia dalam konteks dalam jurnal ini adalah (1) prespektif Makro-Ekonomi (2) prespektif ekonomi kepemimpinan antar masa (3) ekonomi kelembagaan antar waktu

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Ekonomi Kepemimpinan Antar Masa Prespektif Agregat Makro-Ekonomi

a. Kepemimpinan Era Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan keadaan ekonomi Indonesia masih sangat rumit. Bangsa Indonesia masih dihadapkan adanya campur tangan dari bangsa kolonial, sehingga masih menjadikan hambatan dalam mengatur perekonomian negara. Adapun hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia dari segi ekonomi pada masa tersebut adalah penentuan mata uang yang diberlakukan, terjadinya blokade yang dilakukan oleh Belanda terhadap ekspor RI, serta rendahnya penghasilan rakyat sehingga tingkat kemiskinan masih sangat tinggi (Poesponegoro,1993:243). Sekitar tahun 1945-1950-an perekonomian Indonesia belum dapat dikatakan menguntungkan bagi pemerintah Republik Indonesia. Pada masa itu masih dalam situasi perang gerilya melakukan perlawanannya terhadap penjajahan, bahkan ekonomi masih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan Belanda (Sjamsuddin,1993:226).

Pada masa 1950-an struktur ekonomi yang ada di Indonesia masih dalam jejak-jejak peninggalan zaman kolonialisasi. Perekonomian Indonesia masih dikatakan sangat buruk, hal ini karena adanya pengaruh Jepang dan Belanda. Selain hal tersebut bangsa Indonesia masih memasuki era yang sangat sangat berat, karena bangsa Indonesia masih menghadapi gejolak sosial, politik, dan keamanan yang sangat luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi kurang diperhatikan. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat rendah, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajahan kolonial yang mayoritas kepemilikannya adalah orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi diseluruh negeri rusak. Dan pada saat itu adalah laju pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat (Ricklefs,2005:358). Pada dasarnya ditahun 1950-an Indonesia belum mampu untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Langkah- langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan rehabilitasi struktur perekonomian. Para pemimpin berusaha memperbaiki perekonomian yang pertumbuhannya tidak stabil, dengan melakukan program yang lebih menekankan pada pemulihan serta memperbaiki keadaan. Pada masa itu para pemimpin belum memikirkan dan mengupayakan penduduk (Leirissa,1996:93).

Presiden Soekarno dan juga tokoh lainnya telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai sebuah ideologi negara yang sesuai dengan pandangan hidup serta cita-cita bangsa Indonesia. Setelah situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia mendorong Soekarno untuk mencetuskan pemikiran-pemikiran untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme (Sjamsuddin,1993:216). Pemikiran Soekarno dalam bidang ekonomi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang mempunyai ideologi ekonomi anti-kapitalisme, dimana penguatan peran negara dan kedaulatan ekonomi (Dhakidae,2013:118).

Soekarno mencoba menggunakan pendekatan Marxisme untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa kedaulatan politik dan berkepribadian dalam kebudayaan tidak dapat dicapai apabila tidak berdikari dalam ekonomi. Dimana dengan kemandirian ekonomi, tidak dapat dilakukan apabila sebuah bangsa tidak mempunyai kedaulatan secara politik serta berkepribadian dalam kebudayaan berdikari sebagai prinsip dari cara mencapai tujuan terlaksananya pembangunan dengan tidak menerima bantuan negara atau bangsa lain. Tentunya nilai-nilai kemandirian ini bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kerangka pemikiran Soekarno tentang konsep ekonomi yang disebut dengan Ekonomi Berdikari.

Pada tanggal 24 Desember 1963, Presiden Soekarno menerbitkan penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963, yang berisi pengintegrasian Dewan Perancang Nasional ke dalam kabinet kerja dan bentuknya sebuah lembaga yaitu Badan Perancang Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Adapun tugas BAPPENAS adalah :

- a) Menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang, termasuk rencana pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat desa.
- b) Menyusun rencana pembangunan tahunan.

- c) Mengkordinasi semua dan kesejahteraan rakyat yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme (Sjamsuddin, 1993:216).

Program Bappenas belum sepenuhnya memperbaiki perekonomian Indonesia. Sehingga kondisi pemerintah mengalami penurunan pendapatan sehingga menyebabkan defisit. Pada kondisi saat itu mendorong pemerintah mencetak dan mengeluarkan uang baru, menyebabkan uang yang beredar dimasyarakat semakin bertambah banyak tanpa diimbangi penambahan barang, sehingga sepanjang tahun 1960-1965 terjadi inflasi semakin meningkat serta volatilitas yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, Soekarno membuat maklumat berlakunya 14 peraturan pokok yang dikenal dengan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada 28 Maret 1963. Yang tujuannya untuk mengatasi keadaan ekonomi dan mengatasi inflasi di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai bukanlah sekedar mencetuskan suatu terobosan ekonomi, melainkan untuk mendorong perkembangan masyarakat secara menyeluruh artinya untuk mencapai “Demokrasi Nasional” yang kemudian mendorong ketahapan sosialis Indonesia (Sjamsuddin, 1993:238). Deklarasi Ekonomi (DEKON) mempunyai program yang kebijakannya antara lain adalah : 1. Menciptakan susunan ekonomi yang nasional dan demokratis, bersih dari sisa-sisa Imperialisme dan Feodalisme. 2. Ekonomi sosialis Indonesia adalah ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia lain, Dimana setiap orang telah dijamin untuk mendapatkan pekerjaan, sandang pangan, perumahan serta jaminan kehidupan kultural serta spiritual yang baik (Lubis, 1988:77). Deklarasi Ekonomi telah membenarkan betapa pentingnya untuk memperbaiki potensi rakyat dan untuk mewujudkan cita-cita ekonomi sosialis Indonesia, itu bisa tercapai setelah tanpa adanya Imperialisme dan Feodalisme. Inti dari Dekon ini adalah berusaha mencegah terjadinya penyelewengan dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang mandiri. Namun produk dari dekon tersebut pada saat terakhir diubah oleh kelompok komunis dengan memasukan anak kalimat penting yaitu focus harus diberikan pada antiimperialisme. Sehingga berakibat tidak terjadi perubahan dan perkembangan ekonomi (Djiwandono dkk, 2005:16). Deklarasi Ekonomi kemudian disusul dengan pengaruh Dana Moneter Internasioal. Peraturan yang dikeluarkan saat itu menampilkan pendekatan ekonomi terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Pada awal pelaksanaan Deklarasi ini terjadi laju kenaikan biaya hidup 500%, dua bulan kemudian menjadi datar dan laju inflasi dapat sedikit ditekan.

b. Kepemimpinan Era Orde Baru

Mulai bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Yang berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, di era Orde Baru pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Dimasa Pemerintahan Orde Baru mulai menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat, serta meninggalkan pengaruh ideologi komunis. Indonesia kembali ikut serta menjadi anggota PBB, dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF (Tambunan, 2006). Pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri, dengan melalui Repelita. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama.

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Pada masa awal pemerintahan pembangunan hanya terpusat di sektor-sektor tertentu yang berpotensial mendapatkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang singkat dan hanya di pulau Jawa. Dengan adanya sumber dana yang terbatas pada saat itu, dirasa sangat sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan (Tambunan, 2006b). Gagasan-gagasan mengikuti pemikiran Rostow dalam tahapan pertumbuhan, selain stabilitas rehabilitasi dan pembangunan yang menyeluruh pada tahap dasar, tujuan utama dari pada pelaksanaan Repelita I adalah bagaimana membuat Indonesia menjadi swasembada utamanya pada kebutuhan pokok dalam hal ini komoditas pangan yaitu beras.

Ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi, agar suatu pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, yakni sebagai berikut.

- a) Kemauan politik yang kuat. Presiden Soeharto berusaha membangun ekonomi Indonesia, orde sebelumnya Indonesia baru saja merdeka, semangat nasionalisme baik dari pemerintah maupun kalangan

masyarakat masih sangat tinggi, dan berusaha objek yang ditonjolkan paling utama kepada kelompok negara-negara barat dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan proyek-proyek mercusuar.

- b) Stabilitas politik dan ekonomi pada Pemerintahan Orde Baru telah berhasil menekan tingkat inflasi yang signifikan dari sekitar 500% pada tahun 1966 menjadi sekitar 5% hingga 10% pada awal 1970 hingga 1980. Sehingga Pemerintahan dapat meyakinkan elemen-elemen masyarakat, bahwa pembangunan ekonomi dan sosial merupakan jalan menuju kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
- c) Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik. Dengan sumber daya manusia yang semakin baik pemerintah memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait, serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.
- d) Sistem politik dan ekonomi terbuka. Pemerintahan Orde Baru terbuka terhadap semua Negara-negara barat. Hal ini *Foreign Direct Investment* (FDI), sebagaimana penanaman modal asing, dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.
- e) Kondisi ekonomi dan politik dunia yang kondusif akibat oil boom, juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era Orde Baru, pasca perang Vietnam berakhir atau lebih lagi setelah perang dingin berakhir.

Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi dengan kosekuensi biaya ekonomi tinggi, dan fundamental ekonomi yang rapuh, sehingga dalam akhir masanya terjadi *bubble economics*. Hal ini tercermin pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional sehingga terjadi ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman luar negeri dan impor yang tidak seimbang, mendorong pada ketergantungan terhadap keadaan global. Hal ini akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997 (Tambunan, 2006b). Dan hal tersebut akibat *conjunction effect* global seperti pada tulisan jurnal sebelumnya.

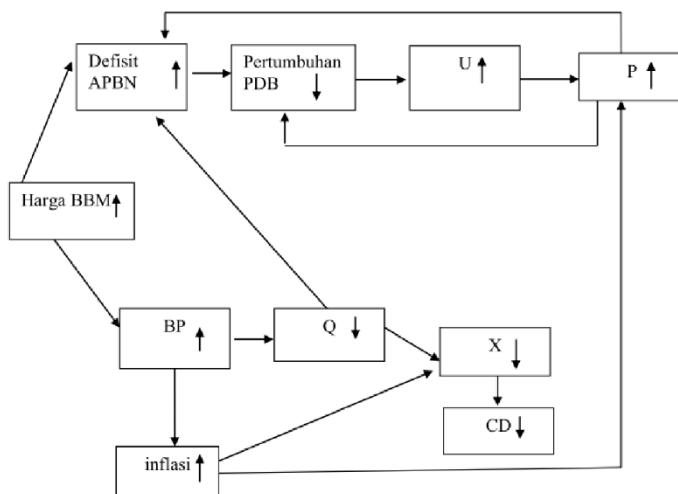
Pada akhir Pemerintahan Orde Baru kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu terus mengalami penurunan. Sehingga terpaksa pemerintah membuat kesepakatan itu harus ditegaskan dalam nota kesepakatan (Letter of Intent/Lol) ditandatangani bersama IMF pada bulan januari 1998. Nota kesepakatan itu terdiri atas 50 butir kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan structural (Tambunan, 2006b).

c. Kepemimpinan Era Pasca-Reformasi

Kondisi Pasca-Reformasi belum begitu stabil kepemimpinan dampak dari fluktuasi harga dan kebutuhan minyak dalam negeri, tidak seperti masa oil boom di awal orde baru. Seperti kehilangan momentum, Indonesia saat itu menjadi pengimpor BBM dalam jumlah yang semakin besar dalam beberapa tahun belakang. Akibatnya, Indonesia bukan hanya menjadi *net oil importer*, saat itu Indonesia adalah salah satu negara pengimpor BBM terbesar di asia, jauh melebihi impor BBM Jepang yang bukan penghasil minyak. Tahun 2010 impor BBM Indonesia diprediksi akan mencapai sekitar 60 persen dan tahun 2015 akan menjadi sekitar 70 persen dari kebutuhan BBM dalam negeri (kurtubi 2005). Dalam hal ini Indonesia telah kalah dalam perdagangan global dimana tingginya impor BBM Indonesia disebabkan oleh konsumen minyak dalam negeri yang meningkat pesat setiap tahun mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi serta peningkatan pendapatan perkapita, pada sisi lain kapasitas kilang minyak di dalam negeri sangat terbatas menurut Kurtubi (2005).

Pada akhir 2005, pemerintah menaikkan lagi harga BBM yang signifikan. Hal ini berdampak negatif terhadap iklim ekonomi domestik, terutama periode jangka pendek menyebabkan biaya produksi meningkat. Secara teori, dampak negatif dari kegiatan kenaikan BBM terhadap kegiatan atau pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kemiskinan.

Gambar 1: Efek Dari Kenaikan Harga BBM Terhadap Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia, Suatu Ilustrasi Teoritis.



Kenaikan harga BBM di pasar dunia jelas akan membuat defisit APBN tambah besar. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin mengalami peningkatan. Defisit pendapatan pemerintah yang meningkat telah mengurangi kemampuan pemerintah disisi pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara disisi lain pengaruh kenaikan harga BBM telah mengurangi produksi (Q) didalam negeri berakibat biaya produksi (BP) meningkat, yang berdampak negatif terhadap eksport (X), ini berarti terjadi pengurangan cadangan devisa (CD). Sehingga kegiatan ekonomi/produksi menurun, menyebabkan pendapatan usaha berkurang, sehingga terjadi devidit APBN yang bersar disebabkan penyerapan pendapatan pajak berkurang. Harga BBM yang tinggi telah mendorong inflasi didalam negeri. Semua telah berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja atau akan meningkatkan pengangguran (U) dan kemiskinan (P). Peningkatan kemiskinan akan memburuk pertumbuhan ekonomi dari efek permintaan didalam negeri berkurang (tambunan, 2006b). Kenaikan pengangguran dan kemiskinan pada akhirnya menambah devidit APBN karena menurunnya pendapatan pemerintah dari pajak pendapatan, sementara disisi lain, pengeluaran pemerintah bertambah dalam upaya mengentaskan kemiskinan, hal tersebut dilakukan agar terjadi *multiplayer effect* agar konsumsi masyarakat dan iklim usaha terjaga yang harapannya meningkatkan penyerapan pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

B. Status Quo Antar Masa Dalam Prespektif Ekonomi Kelembagaan

Neoclassical economics theory, new institutionalist adalah sekumpulan pemikiran yang menerangkan, politik, sejarah, ekonomi dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan (firm) konvensi sosial, keluarga dan lain lain, dalam bingkai *neoclassical economic theory*. North (1990) dalam teorinya membagi kelembagaan menjadi dua yaitu: kelembagaan informal dan kelembagaan formal. Kelembagaan informal merupakan bentuk kelembagaan yang keberadaan didalam masyarakat pada umumnya tidak tertulis. Seperti halnya Adat istiadat, tradisi, *pamali*, kesepakatan, ataupun konvensi dan sejenisnya yang dikelompokan sebagai kelembagaan informal. Sedangkan kelembagaan formal adalah merupakan peraturan tertulis seperti halnya perundang-undangan, kesepakatan (*agreements*), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Serta semua kesepakatan yang berlaku baik secara international, nasional, regional maupun lokal termasuk didalamnya adalah kelembagaan formal. Tidak jarang kelembagaan formal adalah hasil evolusi dari kelembagaan informal, hal tersebut merupakan reaksi atas perubahan berkehidupan masyarakat dengan pola sederhana menuju masyarakat yang mempunyai pola berkehidupan lebih kompleks. Atau dapat dikatakan sebagai tuntutan atas perubahan zaman yang terjadi serta dinamika kehidupan. Masyarakat tradisional yang serba sederhana dengan potensi konflik yang rendah tentu tidak membutuhkan peraturan tertulis dan terperinci, berbeda dengan masyarakat modern yang terkadi banyak kompleksitas kehidupan. Wolfgang Kasper dan Manfred Streit menganggap serta membagi kelembagaan berdasarkan atas proses kemunculannya menjadi dua, yaitu internal dan external institutions. Internal institution adalah institusi yang berasal dan berkembang dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang telah hidup didalam masyarakat. Institusi eksternal adalah institusi pihak luar/ketiga yang membuat peraturan yang mengikat kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu.

Regulasi produk pemerintah termasuk external institutions. Penyebab-penyebab gejolak sosial yang terjadi dalam situasi status quo antar masa kepemimpinan dapat ditinjau dari prespektif Ekonomi Kelembagaan.

a. Peranan institusi Internasional dalam merubah arah ekonomi nasional

Kebijakan institusi internasional dalam mengambil langkah ekonomi maupun politik menyababkan situasi status quo antar masa kepemimpinan. Langkah kebijakan Pemimpin-Pemimpin di Indonesia selama ini sangat terpengaruh oleh institusi-institusi internasional seperti halnya PBB, IMF, ADB, WorldBank dan lain sebagainya dimana Indonesia merupakan Negara berkembang yang membutuhkan bantuan luar negeri.

Bantuan luar negeri memberikan suplemen (tambahan) tabungan, dimana negara tersebut mendapatkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Investasi yang tumbuh dipergunakan untuk kegiatan ekonomi lebih produktif sehingga penghasilan juga akan tumbuh, negara dapat menyisihkan proporsi (pendapatan nasional bersih) dalam bentuk tabungan, yakni tabungan domestik dapat meningkat dengan cepat dari total penghasilan. Sehingga tabungan domestic pada capaian titik tertentu cukup untuk membiayai volume investasi yang dibutuhkan. Bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dibutuhkan tanpa bantuan.

Dengan demikian, teori-teori suplemen merujuk pada "*Self-sustaining growth*" (pertumbuhan secara berkesinambungan). Pada dasarnya teori suplemen terletak pada sumber pembangunan non sumber pembangunan. Hal tersebut cenderung kurang memperhatikan dampak distribusi dan konsumsi seperti juga buruh tani, dan industrialis urban. Faktor utama teori itu adalah mengkomodir interaksi yang tidak mudah dan permasalahan yang kompleks dalam tiap-tiap negara.

Menurut White, kajian pada salah satu faktor saja untuk memahami pembangunan mulai ditinggalkan dalam pertengahan tahun 1960-an. Ahli-ahli cenderung bergeser pada institusi-institusi pembangunan dan pada bentuk organisasi sosial yang mendorong pada pembangunan. Adanya transfer adalah keahlian, tradisi-tradisi pembentukan organisasi sebagaimana telah berkembang di negara-negara mapan. Dengan demikian, usaha memperhalus pandangan proses pembangunan implisit dalam teori-teori suplemen, secara tidak langsung terlihat bantuan merupakan instrumen untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan negara penerima donor, yang kedua, terlihat bantuan bukan sebagai alat suplemen, tetapi sebagai merupakan hal yang lebih efisien dan lebih bersumber pada modernisasi.

Terdapat dua alasan umum dari donor-oriented dalam hubungan internasional. Pertama adalah negara donor mencari tujuan-tujuan dalam program bantuan dalam pembangunan ekonomi. Kedua adalah lebih politis, yaitu Negara donor membantu dan mendorong kemakmuran untuk negara-negara miskin dalam kepentingan utama negara-negara kaya. Hal tersebut merupakan kepentingan jangka panjang negara-negara kaya dalam kemakmuran negara-negara miskin mengandung kepentingan ekonomi dan politik. Dalam arti politik negara-negara kaya dapat mengatur stabilisasi. Berdasarkan pada asumsi bahwa kemiskinan dan kelaparan menghasilkan ketidakpuasan, dan ketidakpuasan menghasilkan ketidakstabilan politik. Hal itu dijadikan momentum untuk memberikan bantuan sebagai Negara kaya (donor) dengan jalan investasi untuk mendorong lagi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut sebagai politik untuk mempertahankan status quo.

Hal ini juga ketika negara-negara Eropa Barat mengalami kesulitan dibidang ekonomi setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sehingga diperlukan bantuan dana sebagai upaya pemulihan perekonomian mereka dari akibat peperangan. Doktrin Marshall Plan dan Brady Plan yang diterapkan di Eropa Barat dan di negara lain. Hal itu membuat peranan awal bagi Amerika Serikat untuk membantu negara-negara sekutu dari kehancuran dan depresi ekonomi, serta menghambat pengaruh komunisme internasional dengan politik pembendungan di kawasan tersebut.

Menurut Paul Samuelson bahwa peranan *International Institution* (institusi internasional) sangat kuat dan dominan peranannya di luar pengaruh kebijakan negara dalam upaya membantu negara-negara yang menghadapi kesulitan dan krisis ekonomi. Peranan Amerika Serikat sangat besar, karena pendukung dana terbesar dari lembaga tersebut berkedudukan di Washington. Disamping itu, Dana IMF mempunyai kekuatan dari dukungan dana AS sebagai raksasa kapitalisme. Disisi lain dukungan kelompok negara-negara G-7 (negara-negara industri maju) dan para anggotanya. Peranan dan kedudukan IMF tidak dapat dipisahkan dengan pengaruh Amerika Serikat dan bantuan negara industri maju, termasuk Jepang sebagai satu negara kawasan Asia.

Menurut Joseph Frankel yang membahas mengenai International Institution dikatakan sebagai kemampuan yang dimiliki organisasi PBB (United Nation) oleh peran dari order organisasi internasional dengan lebih dari 160 negara berkompetensi dalam bidang keamanan, politik dan non-politik matters. Kemudian dikatakan "Struktur semua negara pada dasarnya sama, meskipun menunjukkan beberapa variasi sesuai dengan seberapa relevan aktivitas mereka terhadap politik kekuasaan dan peran telah didominasi oleh negara-negara besar. Semua anggota diwakili dalam beberapa bentuk majelis, di PBB sendiri disebut Majelis Umum PBB. Rekomendasi-rekomendasi

– yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum yang hanya mensyaratkan dua pertiga mayoritas bahkan untuk urusan-urusan penting.

b. Prespektif Ekonomi Kelembagaan dalam situasi sosial Status Quo

Menurut Arifin & Rachbini dalam Deliarnov (2006:9), ekonomi politik lahir untuk menemukan sinergisitas, mengisi ruang kosong yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ilmu saja. Sehingga ilmu ekonomi dan ilmu politik sebenarnya dapat menjadi satu. Sehingga terlihat antara stabilitas politik dan juga pencapaian ekonomi. Menurut Aisen & Veiga dalam Yustika (2013:100) dalam hasil penelitiannya didapat intinya bahwa stabilitas politik secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ronald Coase mengemukakan tentang konsep biaya transaksi (*transaction cost*). Menurutnya, biaya transaksi mempengaruhi kelembagaan dan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh para pemimpin (Coase, 1988). Teori tersebut sering dikenal *New Institutional Economics* (NIE).

Menurut Max Weber dalam teorinya transaksi merupakan tindakan yang diperlukan dalam penetapan, memelihara serta mengubah hubungan sosial (Weber, 1968). Definisi tersebut dalam upaya mempertahankan kerangka kelembagaan dimana proses transaksi ekonomi bisa terjadi. Pendapat lain mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya untuk menjalankan sistem ekonomi (Williamson, 1985). Sedangkan Dorfman (1981) mengartikan biaya trasaksi adalah biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Doglas North menyebutnya sebagai biaya untuk menspesifikasi danmemaksakan kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga dengan sendirinya mencakup biaya organisasi politik dan ekonomi. Dengan demikian yang termasuk biaya transaksi adalah biaya negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran (North, 1991). Atau biaya pencarian informasi, biaya negosiasi, dan biaya pengawasan, pemakaian (*enforcement*) dan biaya pelaksanaan (Mburu, 2002).

Richter dan Furubotn (2000) biaya transaksi dibagi menjadi tiga jenis, yang disesuai dengan jenis transaksinya, yaitu:

- 1) *Market transaction cost*: Seluruh biaya yang dikeluarkan agar barang dan jasa bisa sampai ke pasar. Biaya persiapan kontrak (biaya pencarian atau pengadaan informasi); biaya pembuatan kontrak (biaya bargaining dan negosiasi serta pembuatan keputusan); biaya monitoring dan pengawasan kontrak (biaya supervisi dan penegakan kesepakatan) Biaya informasi (mencari atau menyediakan informasi): biaya iklan, mendatangi calon customer, mengikuti pameran, pasar mingguan, biaya komunikasi (post, telepon, dan lain-lain), harga barang yang sama yang diminta oleh beberapa supplier, biaya pengujian kualitas dan biaya pengadaan pegawai yang berkualitas dimana *bargaining and decision cost* meliputi: biaya yang dikeluarkan agar informasi yang dikumpulkan dapat bermanfaat, biaya konsultasi dan lain sebaginya. *Supervision and enforcement cost*: biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan pengiriman barang supaya sampai tepat waktu, mengukur qualitas serta jumlah produk yang ditransaksikan, biaya pengawasan kontrak supaya berjalan sesuai kesepakatan,
- 2) *Managerial Transaction cost* Biaya terkait dengan upaya menciptakan keteraturan, contoh:
 - a) biaya membuat, mempertahankan atau mengubah rancangan dan struktur oragnisasi, meliputi biaya personal management, IT, mempertahankan kemungkinan pengambil alihan pihak lain, publik relation, dan lobby
 - b) Biaya menjalankan organisasi, meliputi: biaya informasi (biaya pembuatan keputusan, pengawasan pelaksanaan perintah sesuai keputusan, mengukur kinerja pegawai, biaya agen, manajemen informasi. Hal tersebut termasuk juga biaya pemindahan barang internal perusahaan.
- 3) *Political Transaction cost* adalah biaya yang terkait dengan pembuatan tata aturan secara kelembagaan (*public goods*) sehingga diharapkan transaksi pasar dan manajerial dapat berjalan dengan baik.
 - a) Biaya pembuatan (*setting up*), pemeliharaan, perubahan organisasi politik formal dan informal, seperti biaya halnya penetapan kerangka hukum, struktur administrasi pemerintahan, militer, sistem pendidikan, pengadilan dan lain-lain.
 - b) Biaya menjalankan bentuk pemerintahan, peraturan pemerintah atau masyarakat yang mempunyai tata negara, seperti biaya legislasi, pertahanan, administrasi hukum, pendidikan, termasuk didalamnya semua biaya pencarian serta pengumpulan dan pengolahan informasi yang diperlukan agar tata pemerintahan dapat berjalan. Biaya yang melibatkan masyarakat dalam proses politik termasuk ke dalam transaksi politik

Peran Kelembagaan Dalam Menurunkan Biaya Transaksi birokrasi, organisasi, dan lain-lain dianggap sebagai sebuah governance (tata kelola) yang didalamnya terjadi transaksi atau interaksi antara individu maupun bagian.

Transaksi dengan pihak luar governance terpengaruh oleh lingkungan kelembagaan eksternal yang tingkatannya lebih tinggi. Perubahan pada lingkungan kelembagaan eksternal berpengaruh terhadap transaksi yang terjadi antar individu maupun bagian dalam governance. Transaksi dalam suatu governance juga dipengaruhi oleh sifat individu yang kecenderungan *opportunis*, mementingkan diri sendiri (*self interest*), serakah (*greedy*). Contoh: Pemda adalah sebuah governance, adapun transaksi yang terjadi dipengaruhi oleh kelembagaan internal dan juga kelembagaan eksternal. Negara juga merupakan sebuah governance, transaksi terjadi mengikuti kelembagaan internal tetapi Negara juga dipengaruhi oleh kelembagaan global.

Semakin kompleks biaya transaksi semakin mahal dan menyesuaikan karakteristik biaya transaksinya. Williamson (1996) berpendapat ada tiga karakteristik transaksi yang penting, yaitu:

- Ketidakpastian (*uncertainty*), dalam kaitannya dengan produksi, supply, demand, fluktuasi harga, iklim hingga kondisi lapangan.
- Frekuensi, yang tergantung pada keadaan serta kemampuan produksi. Produk pertanian, perikanan, dimana transaksi pada musim panen atau musim ikan melimpah berbeda dengan transaksi pada musim paceklik.
- Spesifitas, yang meliputi lokasi yang spesifik, aset fisik yang spesifik, aset manusia. Asset yang spesifik membatasi kegiatan tertentu yang memiliki transaksi yang terbatas.

Berdasarkan Beckman (2000) memformulasikan tiga determinan biaya transaksi:

- Atribut aktor atau pelaku yang melekat (rasionalitas terbatas dan oportunitisme) menentukan besaran biaya transaksi
- Sifat atau atribut transaksi (spesifitas asset, ketidakpastian, frekuensi)
- Dipengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola (market, hierarki, hybrid, regulasi, dan lain-lain)

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Demokrasi Pancasila, setiap 5 (lima) tahun sekali melakukan Pemilihan Langsung (PEMILU). Caporaso & Levine berpendapat bahwa pilihan publik sebagai aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. James Buchanan menjelaskan bahwa pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. (Rachbini, 2001).

Berdasarkan kedua aspek utama dalam kajian ilmu tersebut, maka sebagai pemasok (*supplier*) adalah para politisi, parpol, birokrasi dan pemerintah; sedang sebagai peminta (*demander*) adalah pemilih (*voters*). Jenis transaksi publik serta alat transaksi suara dan jenis pertukaran politik sebagai pertukaran.

Pilihan publik memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Bagaimana menunjukkan sikap (*behavior*) yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada.
- 2) Mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bisa lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak.
- 3) Dapat menjadi petunjuk untuk *decision maker* untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadinya kegentingan sosial diawali gejolak makro-ekonomi dimana lembaga eksternal (global) memiliki pengaruh terhadap pilihan pemerintah untuk menentukan kebijakan yang rumit akibat tidak bertemuanya kepentingan rakyat dan pemerintah sebagai lembaga yang eksternal dalam satu kelembagaan yang sama dalam bentuk negara.
2. Dari kepemimpinan antar masa terjadi gejolak ekonomi akibat *vacum of power* atau kebijakan antar pemimpin tidak saling mempengaruhi, ataupun pergantian individu mempunyai pemikiran yang tidak sama sesuai kepentingan individu kepemimpinan.
3. Pilihan publik dalam kenyataannya sangat erat kaitannya dengan mayarakat pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan dan aturan-aturan pemilihan umum.
4. Pemerintah dan rakyat harus mempunyai visi yang sama agar tidak ada friksi by design dari kepentingan-kepentingan global, saat situasi status quo kepemimpinan Indonesia.

B. Saran

1. Mengurangi ketergantungan terhadap kelembagaan global, utamanya terkait dengan sistem moneter untuk meminimalisir resiko dengan mengurangi pinjaman luar negeri di masa genting pergantian antar pemimpin.

- Untuk mengurangi pengaruh campur tangan lembaga donor, yang mempunyai misi menguasai pada masa transisi kepemimpinan.
2. Diperlukan rancangan kebijakan berkelanjutan dan jangka panjang, agar tidak terjadi friksi pergantian antar kepemimpinan yang rentan akan kepentingan lembaga donor untuk memanfaatkan keadaan Negara.
 3. Dalam situasi transisi pentingnya pemimpin negara mengambil kebijakan yang tepat, serta pentingnya lembaga pemerintah menguasai keadaan ekternal lembaga (elemen rakyat) agar tidak terjadi *people power*, akibat kesalahan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, (2014). Ekonomi Berdikari Sukarno. Komunitas Bambu. Depok
- Arisnadi, Herman, (2015). Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi, Divapres, Yogyakarta.
- Damsar, Dr., Prof, (2015) Pengantar Teori Sosiologi, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Dekker, I Nyoman. (2003). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, Jakarta: Pustaka Ilmu
- Furubotn, E. G and R. Richter. (2000). Institution and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. Ann Arbor. The University of Michigan Press.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. (2008), Teori Sosiologi, Dari Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Kerasi Wacana, Yogyakarta.
- Gilpin, Robert., (1987)The Challenge of Global Capitalism,Princeton Univer sity Press, 2000 The Polical Economy of International Relation, Prinseton University Press, New Jersey.
- Hasbullah, J. (2006). *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press Jakarta.
- Inayah. (2012). Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. *Jurnal Ragam*. Vol. 12 (1) pp. 43-49.
- Khomsan, Ali, dkk, (2015) Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin, Obor, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Minsky, Heyman P. Instability and Finance, Armond, New York, ME.
- Moeleong, Lexy. (2002). Metode Penelitian Kualitatif.: Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nana Sudjana dan Ibrahim, (2009)Penelitian dan Penilaian Pendidikan: Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, (2004) Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan: Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Ricklefs, MC. (2003) Sejarah Indonesia Modern 2001-2004. Jakarta : Serambi Ilmu
- Salim, Agus, (2014) Perubahan Sosial: Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. (2007). *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*.: Alfabeta, Bandung.
- Sujdarwo, (2011) Metodologi Penelitian Sosial:Mandar Maju, Bandung
- White, John, (1974) The Politics of Foreign Aid, London, Sidney, : The Bodley Head, Toronto.
- Winter, A Jeffry, Power in Motion(1999), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. Dosa-Dosa Politik Orde Baru, Penerbit Djambatan.